

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ikasari, Morita Dhita. Santoso, Imam. Astuti, Retno. Septifani, Riska dan Armanda, Widya Tiyas. (2021). *Manajemen Risiko Agroindustri Teori dan Aplikasinya*. Penerbit UB Press.

Situmorang Chazali. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI).

Kasiram, Mochammad. (2008). "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Malang: UIN Malang Press.

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom,M.Si.MM. (2022). *Manajemen Risiko*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.

Jurnal:

Nazhifa, Khaira Alya dan Fatima, Eliza. (2023). *Rancangan Implementasi Manajemen Risiko pada Tech-Startup (Studi Kasus PT XYZ)*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Volume 6 Nomor 2, 432-446.

Oktapiani, Fanny. Rosmiati, Mia dan Indrawati, Lili (2021). *Implementasi Risiko dalam Upaya Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Indonesian Accounting Research. Vol.1, No. 2. 378-385.

Shinta Tomuka (2013). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*. Jurnal Politico. Vol 2, No. Diakses 30 Maret 2023.

Ahmad Maizi ,Faahrizal (2019). *Analisis Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Polban. Vol 1 No. 1. Diakses 1 April 2023.

Hindriani, Nuning (2012). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)*. Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol. 15 No. 3. Diakses 22 April 2023.

Carolina, Yohana. Tobing Lumban, Agustinus. (2023). *Evaluasi Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Manajemen Risiko*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol. 5 No. 11. Diakses 1 Juni 2023.7.2023.

Sari, Maya. *Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance: Studi Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia*. Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganesha. Vol. 6. No. 2. Diakses 10 Juni 2023.

Lestari, Rini. Selsabila, Larasati. (2022). *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko dan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Terhadap Kinerja Perusahaan*. Jurnal Bandung Conference Series: Accountancy. Vol. 2, No.1. Diakses 20 Juni 2023.

Website Internet:

<https://www.kemenkumham.go.id/> (Diakses pada tanggal 10 Juli 2023).

<https://www.balitbangham.go.id/> (Diakses pada tanggal 10 Juli 2023).

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Indikator	Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretaris Pokja Pengawasan	Bendahara Pengeluaran Badan Strategi Kebijakan	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota Tim Pokja Pengawasan
	1. Mengidentifikasi risiko	<p>1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tahapan proses identifikasi risiko yang ada di Badan Penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu terdapat risiko apa saja yang ada di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p>	<p>1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tahapan proses identifikasi risiko yang ada di Badan Penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu terdapat risiko apa saja yang ada di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p>	<p>1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tahapan proses identifikasi risiko yang ada di Badan Penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu terdapat risiko apa saja yang ada di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p>	<p>1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tahapan proses identifikasi risiko yang ada di Badan Penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu terdapat risiko apa saja yang ada di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p>
2. Menganalisis Tingkat Risiko	3. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar pengaruh Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi pada ketercapaian tujuan dan sasaran yang	3. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar pengaruh Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi pada ketercapaian tujuan dan sasaran yang	3. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar pengaruh Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi pada ketercapaian tujuan dan sasaran yang	3. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar pengaruh Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi pada ketercapaian	3. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar pengaruh Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi pada ketercapaian tujuan dan

	<p>ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM?</p> <p>4. Menurut Bapak/Ibu apakah manajemen risiko dibutuhkan untuk dapat menangani permasalahan tersebut?</p>	<p>ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM?</p> <p>4. Menurut Bapak/Ibu apakah manajemen risiko dibutuhkan untuk dapat menangani permasalahan tersebut?</p>	<p>ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM?</p> <p>4. Menurut Bapak/Ibu apakah manajemen risiko dibutuhkan untuk dapat menangani permasalahan tersebut?</p>	<p>tujuan dan sasaran yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham?</p> <p>4. Menurut Bapak/Ibu apakah manajemen risiko dibutuhkan untuk dapat menangani permasalahan tersebut?</p>	<p>sasaran yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham?</p> <p>4. Bapak/Ibu apakah manajemen risiko dibutuhkan untuk dapat menangani permasalahan tersebut?</p>
3.Evaluasi Risiko	<p>5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penanganan yang dilakukan untuk mengevaluasi risiko-risiko pada permasalahan tersebut?</p> <p>6. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar sumber potensi risiko yang terjadi di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p>	<p>5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penanganan yang dilakukan untuk mengevaluasi risiko-risiko pada permasalahan tersebut?</p> <p>6. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar sumber potensi risiko yang terjadi di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p>	<p>5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penanganan yang dilakukan untuk mengevaluasi risiko-risiko pada permasalahan tersebut?</p> <p>6. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar sumber potensi risiko yang terjadi di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p>	<p>5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penanganan yang dilakukan untuk mengevaluasi risiko-risiko pada permasalahan tersebut?</p> <p>6. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar sumber potensi risiko yang terjadi di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p>	<p>5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penanganan yang dilakukan untuk mengevaluasi risiko-risiko pada permasalahan tersebut?</p> <p>6. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar sumber potensi risiko yang terjadi di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p>
4.Merespons Risiko	<p>7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara menghindari jika terdapat risiko yang tinggi pada</p>	<p>7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara menghindari jika terdapat risiko yang tinggi pada</p>	<p>7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara menghindari jika terdapat risiko yang tinggi pada</p>	<p>7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara menghindari jika terdapat risiko yang</p>	<p>7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara menghindari jika terdapat risiko yang</p>

	<p>Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p> <p>8. Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat cadangan risiko yang terjadi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p>	<p>Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p> <p>8. Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat cadangan risiko yang terjadi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p>	<p>Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p> <p>8. Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat cadangan risiko yang terjadi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p>	<p>tinggi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p> <p>8. Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat cadangan risiko yang terjadi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p>	<p>tinggi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p> <p>8. Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat cadangan risiko yang terjadi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?</p>
5. Mengontrol Sumber Daya	<p>9. Menurut Bapak/Ibu Apakah terdapat kebijakan-kebijakan yang menangani manajemen risiko yang dilakukan?</p> <p>10. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan tersebut dapat mengendalikan berjalannya suatu manajemen risiko?</p>	<p>9. Menurut Bapak/Ibu Apakah terdapat kebijakan-kebijakan yang menangani manajemen risiko yang dilakukan?</p> <p>10. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan tersebut dapat mengendalikan berjalannya suatu manajemen risiko?</p>	<p>9. Menurut Bapak/Ibu Apakah terdapat kebijakan-kebijakan yang menangani manajemen risiko yang dilakukan?</p> <p>10. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan tersebut dapat mengendalikan berjalannya suatu manajemen risiko?</p>	<p>9. Menurut Bapak/Ibu Apakah terdapat kebijakan-kebijakan yang menangani manajemen risiko yang dilakukan?</p> <p>10. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan tersebut dapat mengendalikan berjalannya suatu manajemen risiko?</p>	<p>9. Menurut Bapak/Ibu Apakah terdapat kebijakan-kebijakan yang menangani manajemen risiko yang dilakukan?</p> <p>10. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan tersebut dapat mengendalikan berjalannya suatu manajemen risiko?</p>
6. Perencanaan Reaksi	<p>11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perencanaan reaksi yang dilakukan untuk dapat</p>	<p>11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perencanaan reaksi yang dilakukan untuk dapat</p>	<p>11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perencanaan reaksi yang dilakukan untuk dapat</p>	<p>11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perencanaan reaksi yang dilakukan untuk dapat</p>	<p>11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perencanaan reaksi yang dilakukan untuk dapat</p>

	<p>memulihkan kondisi dari dampak risiko tersebut?</p> <p>12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perencanaan aksi jika terdapat risiko yang tidak terduga?</p>	<p>memulihkan kondisi dari dampak risiko tersebut?</p> <p>12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perencanaan aksi jika terdapat risiko yang tidak terduga?</p>	<p>memulihkan kondisi dari dampak risiko tersebut?</p> <p>12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perencanaan aksi jika terdapat risiko yang tidak terduga?</p>	<p>memulihkan kondisi dari dampak risiko tersebut?</p> <p>12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perencanaan aksi jika terdapat risiko yang tidak terduga?</p>	<p>memulihkan kondisi dari dampak risiko tersebut?</p> <p>12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perencanaan aksi jika terdapat risiko yang tidak terduga?</p>
<p>7. Pelaporan dan Pemantauan</p>	<p>13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tahapan pelaporan yang dilakukan terhadap risiko yang terjadi?</p> <p>14. Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat pemantauan yang dilaksanakan terhadap proses manajemen risiko tersebut?</p>	<p>13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tahapan pelaporan yang dilakukan terhadap risiko yang terjadi?</p> <p>14. Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat pemantauan yang dilaksanakan terhadap proses manajemen risiko tersebut?</p>	<p>13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tahapan pelaporan yang dilakukan terhadap risiko yang terjadi?</p> <p>14. Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat pemantauan yang dilaksanakan terhadap proses manajemen risiko tersebut?</p>	<p>13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tahapan pelaporan yang dilakukan terhadap risiko yang terjadi?</p> <p>14. Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat pemantauan yang dilaksanakan terhadap proses manajemen risiko tersebut?</p>	<p>13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tahapan pelaporan yang dilakukan terhadap risiko yang terjadi?</p> <p>14. Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat pemantauan yang dilaksanakan terhadap proses manajemen risiko tersebut?</p>

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

TRANKIP WAWANCARA

INFORMAN 1

Informan Penelitian : Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tempat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hari dan Tanggal : 3 Juli 2023

Waktu : 10.30 - Selesai

Peneliti : Bagaimana tahapan proses identifikasi risiko yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham?

Informan : Badan Strategi Kebijakan, proses identifikasinya pertama-tama kita mengetahui goals tujuan dari organisasi ini, biasanya tiap tahun kita menetapkan tujuan-tujuan itu biasanya 5 (lima) tahunan yang dimasukan kedalam dokumen restar, kemudian untuk mendapat tujuan itu organisasi ini menetapkan target kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya. Target kinerja 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan seterusnya kita tetapkan dari target kinerja itu kemudian kita menetapkan proses-proses untuk mencapai target tersebut. Jadi penetapan target kinerja kemudian kita menurunkannya dalam proses-proses atau tahapan bagaimana kita mencapai target kinerja itu dari setiap proses kemudian kita lihat lalu di identifikasikan kemungkinan permasalahan akan muncul dalam mencapai target itu, disitulah sebenarnya bagaimana kita bisa mengidentifikasi potensi kegagalan dari usaha yang kita capai, potensi kegagalan itulah yang kita identifikasi sebagai faktor-faktor risiko. Kita harus tahu tahapan atau cara kita pencapaian target itu, disetiap tahapan kita identifikasi faktor kegagalan, hambatan, kendala yang kita jadikan sebagai risiko kalau tidak diantisipasi itu kemungkinan akan menghambat pencapaian dari target yang kita mau capai.

Peneliti : Terdapat risiko apa saja yang ada di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?

Informan : Risiko Atas Layanan Publik itu ada permasalahan-permasalahan seperti memenuhi kebutuhan layanan penelitian dan ada lagi terpenuhinya kebutuhan stakeholders di bidang Hukum dan HAM yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan sosialisasi,

selanjutnya ada buku-buku yang ada di Balitbangkumham dalam penulisan karya tulis (ilmiah), ada juga layanan diskusi melalui opini yang kita hadirkan narasumber untuk sosialisasi, publikasi dari hasil kajian isu aktual peneliti, terakhir itu tidak tersedia jabatan fungsional perpustakaan yang ahli dalam pengelolaan perpustakaan. Untuk Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi mempunyai pengumpulan data yang tidak relevan atau tidak sesuai di lapangan, ada juga peluang gratifikasi terhadap pemberian jurnal dari penulis kepada pengurus jurnal. Disini ada juga proses pengurusan kenaikan jenjang jabatan dan juga pengadaan barang dan jasa yang belum sesuai aturan. Terakhir di Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi tidak adanya pertanggung jawaban kegiatan terhadap pemberian honor yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

Peneliti : Seberapa besar pengaruh Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi pada ketercapaian tujuan dan sasaran yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham?

Informan : Menurut saya itu pengukuran dan itu harus diukur harus ada perhitungan kuantitatif, misalnya dari 0-100 saya mengatakan 50 itu saya tidak bisa menjawab.

Peneliti : Apakah manajemen risiko dibutuhkan untuk dapat menangani permasalahan tersebut?

Informan : Iya sangat dibutuhkan, karena organisasi ini butuh manajemen risiko untuk mengetahui risiko-risiko yang ada.

Peneliti : Bagaimana penanganan yang dilakukan untuk mengevaluasi risiko-risiko pada permasalahan tersebut?

Informan : Kalau di kita biasanya melakukan rapat-rapat *monev*, monitoring evaluasi diawal proses atau biasanya diawal-awal tahun itu ditetapkan faktor-faktor atau hal-hal yang bisa menjadi risiko pencapaian target itu disebutnya sebagai faktor risiko ada dokumen risiko pelayanan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja itu sudah ditetapkan awal tahun, kemudian setelah itu diinformasikan pada saat ditetapkan itu juga kita akan memasukan pendapat semua usulan unit, dari pendapat semua usulan unit kemudian ditetapkan keputusan oleh badan yang menjadi identifikasi risiko. Intinya adalah risiko, dokumen risiko, misalnya dalam pelayanan publik atau dalam pencapaian target kinerja didalam dokumen itu tidak hanya ditetapkan faktor risikonya tapi juga ditetapkan bagaimana meminimalisir agar risiko tidak muncul, tapi kalau muncul bagaimana solusinya. Di dokumen itu biasanya ditindak lanjutnya ditetapkan harus dilakukan berapa kali dalam setahun misalnya kita ada triwulan

dan semester, kalau triwulan 3 (tiga) bulan sekali artinya 4 (empat) kali dalam setahun dilakukan monitoring evaluasi atas faktor risiko yang ditetapkan diawal tahun apakah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir risiko itu sudah dilakukan apa belu, didalam rapat monev itu dilihat kalau sudah diceklis, misalnya sudah dilakukan triwulan pertama tapi belum dilakukan akan ditanya kenapa belum dilakukan apa kendalanya, didalam rapat monev itu fungsinya memantau progres pelaksanaan kerja kita, didalam monev faktor risiko melihat yang kita tetapkan langkah-langkah antisipasinya sudah dilakukan atau belum, kalau belum ya kenapa dilihat dan segera dilaksanakan.

Peneliti : Seberapa besar sumber potensi risiko yang terjadi di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?

Informan : Sumber potensi yang ada di Badan Strategi Kebijakan ini ada yang namanya risiko tinggi, risiko sangat tinggi, risiko sedang, risiko rendah, dan risiko sangat rendah. Jadi bisa dilihat dari masing-masing tingkatan risiko itu si biasanya kalau dari saya.

Peneliti : Bagaimana cara menghindari jika terdapat risiko yang tinggi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?

Informan : Menghindarinya dengan kita sudah menetapkan langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah antisipasi itu harus dilakukan kalau tidak dilaksanakan mungkin risiko itu akan terjadi atau muncul.

Peneliti : Apakah terdapat cadangan risiko yang terjadi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?

Informan : Pastinya selalu ada cadangan disetiap risiko-risiko apalagi Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi masing-masing mempunyai cadangan jika risiko itu sulit atau telalu tinggi.

Peneliti : Apakah terdapat kebijakan-kebijakan yang menangani manajemen risiko yang dilakukan?

Informan : Kebijakan itu ada identifikasi risiko kemudian ditetapkan risikonya dalam 1 (satu) dokumen kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan ini hasil mitigasi risikonya, mitigasi risikonya harus dilaksanakan dan dipantau.

Peneliti : Apakah kebijakan tersebut dapat mengendalikan berjalannya suatu manajemen risiko?

Informan : Iya pasti kita buat kebijakan itu benar-benar sudah pastinya dan seharusnya bisa untuk mengendalikan risiko-risiko yang terjadi saat ini.

Peneliti : Bagaimana perencanaan reaksi yang dilakukan untuk dapat memulihkan kondisi dari dampak risiko tersebut?

Informan : Kembali lagi kepada tindakan memanggil lagi pihak-pihak terkait kemudian membahas bersama atas risiko yang terjadi kemudian ditetapkan langkah-langkah biar dampaknya tidak meluas artinya bisa diputus atau sampai disitu saja, itu dilakukan pembahasan bersama dan tidakan bersama, sebenarnya sesimpel itu agar antisipasi tidak meluas lagi.

Peneliti : Bagaimana perencanaan aksi jika terdapat risiko yang tidak terduga?

Informan : Mungkin kita harus memahami kondisi dengan jelas supaya bisa berjalan dengan semestinya, kalau cara memulihkannya paling kita butuh rekomendasi-rekomendasi atau saran dan masukan kepada pemilik risiko yang terkait agar ada jalan yang lebih gampang untuk menghindari risiko dan mengecilkan risiko yang terjadi.

Peneliti : Bagaimana tahapan pelaporan yang dilakukan terhadap risiko yang terjadi?

Informan : Kalau pelaporan hampir sama dimana ada pemantauan disitu ada pelaporan.

Peneliti : Apakah terdapat pemantauan yang dilaksanakan terhadap proses manajemen risiko tersebut?

Informan : Didalam dokumen risiko ada hal-hal yang harus dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko itu disebutkan kita melakukan perperiode tadi bisa setiap bulan atau per 3 (tiga) bulanan disini mungkin biasanya pertiga bulanan atau triwulanan yang dimonev secara periodik tadi.

TRANKIP WAWANCARA

INFORMAN 2

Informan Penelitian : Sekretaris Pokja Pengawasan
Tempat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hari dan Tanggal : 31 Mei 2023
Waktu : 09.00 - Selesai

Peneliti : Bagaimana tahapan proses identifikasi risiko yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham?

Informan : Identifikasi disini menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko yang terkait dengan kegiatan yang dinilai risikonya. Jadi metodologi yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedangkan keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang mengerti kegiatan tersebut dan menjadi pihak yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan.

Peneliti : Terdapat risiko apa saja yang ada di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?

Informan : Kalau risiko yang di pelayanan publik itu ada 6 (enam) risiko, ada pengkajian penelitian, pelayanan narasumber, jurnal, ebook, perpustakaan sama opini nah nanti bukan opini lagi karena opini itu kepanjangan obrolan peneliti sekarang jadi opini kebijakan, opininya sekarang bukan suatu kepanjangan lagi tetapi menjadi opini saja, opini beneran terkait opini kebijakan. Opini analisis-analisis kebijakan disini sebagai narasumber di kanwil-kanwil (kantor wilayah) yang dibawah Kemenkumham yang menyelenggarakan tentang pelayanan publik yang masih berlaku, tapi kita sudah beda indikator. Masing-masing layanan publik mempunyai risiko yang berbeda tapi yang paling berisiko itu kalau dilihat-lihat dari persentasenya risiko itu tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu tinggi banget selayaknya pelayanan publik di Kemenkumham yang laen, karena memang skop kita itu hanya ke internal saja karena memang yang dikaji dan diteliti untuk pelayanan publik pengkajian penelitian itu juga skopnya tidak skop eksternal tetapi lebih ke skala internal. Skala internal dimana kita memang biasanya hasilnya dari penelitian pengkajian yang berupa rekomendasi untuk dilaksanakan kebijakan

kepada internal, misalnya unit Eselon 1 (satu) yang unit teknik itu kan ada Direktorat Jenderal yang melayani pembentukan surat keputusan PP (Perusahaan terbatas) itu mereka yang melayani pelayanan untuk umum yang langsung ke eksternal masyarakat jadi otomatis risikonya lebih besar atau lebih tinggi kita yang melayani disitu tapi jika rekomendasi tidak digunakan itu yang menjadi faktor risiko paling tidak tepat sasaran terhadap stakeholders.

Kalau pelayanan publik narasumbernya paling benturan kepentingan yang terjadi, misalnya kita jadi narasumber berarti memberikan layanan, biasanya peneliti atau analis kebijakan yang memberikan narasumber kepada internal juga internal Hukum dan HAM jadi narasumbernya itu karena faktor kedekatan atau dari segi teknisnya masih mempengaruhi hasil *output* dari apa yang diomongin dari narasumber dan juga biasanya narasumber itu yang menjadi ketua pemimpin atau ketua pengkajian sama halnya dengan berkesinambungan penelitian dan pengkajian. Jadi kalau narasumbernya itu sudah memberikan rekomendasi dia tidak mungkin berbicara dan berkata lain tidak sesuai dengan pengkajian penelitian. Jika rekomendasi tidak dimanfaatkan otomatis apa yang diomongin atau diutarakan pada saat momentum yang dia berikan kesempatan untuk jadi narasumber berarti tidak dimanfaatkan atau tidak teruji lagi berarti tidak valid, jadi memang masuknya risiko sedang dan kebanyakan benturan kepentingan, apa saja yang diopinikan diambil menjadi narasumber paling dari faktor risiko itu kalau pelayanan narasumber.

Kalau *ebook* sama *e-jurnal* itu risikonya sedang karena memang tidak termasuk risiko tinggi, balik lagi biasanya tidak langsung ke masyarakat tapi *ebook* sama *e-jurnal* bisa langsung digunakan masyarakat kalau untuk kalangan akademisi, jadi memang *ebook* sama *e-jurnal* itu lebih ke benturan kepentingan juga, contoh misalnya seandainya ada yang kenal dengan kalangan mahasiswa akademisi dan kadang-kadang memang kita punya kenalan yang kerja sama dengan kita dari kalangan universitas, kalangan dosen yang mereka butuhkan untuk terealisasi atau butuh capaian kinerja mereka sehingga jurnal mereka minta diloloskan makanya itulah yang masih berisiko terkait dengan kualitas dia membuat jurnal itu tidak sesuai dengan syarat tetapi diloloskan begitu saja sama tim reviewan kita yang memang sama-sama saling mengenal.

Kalau untuk perpustakaan ini risikonya sedang mungkin maksudnya risiko sedang yang diperpustakaan itu juga sama dengan *ebook* dan *e-jurnal* tapi bedanya tidak untuk kepentingan tapi hanya untuk

diloloskan saja pada saat peminjaman buku karena memang beberapa hasil *ebook* dari hasil peneliti pengkajian kita itu koleksinya disimpan dipergustakaan, berartikan ada ciri khas lain selain buku-buku biasa yang disimpan menjadi koleksi perpustakaan ini buku-buku hasil pengkajian penelitian kita makanya otomatis dari hasil pengkajian penelitian kita dikoleksikan keperpustakaan itu sebuah risiko. Orang terdekat yang mengetahui atau orang internal yang mengetahui pastikan tidak perlu lagi pake syarat, kalau *ebook* masih minta hubungi kami ada yang kenal kedalem baru bisa dikasih filenya tapi kalau melihat versi cetaknya tinggal ke perpustakaan tinggal meminjam dan mengambil saja atau risiko lainnya seperti halnya peminjaman kadang-kadang kurang ketatnya pengawasan jadinya masih banyak peminjam-peminjam yang tidak bertanggung jawab dari lewat batas waktu yang telah ditentukan karena memang kurang pengawasan petugas dipergustakaan dan perpustakaan tidak punya surat keputusan secara khusus mereka yang bertugas dipergustakaan yang seharusnya setara dengan Eselon II yang mengatur itu karena memang perpustakaan ini bagian umum yang memang di ampuh oleh Eselon II Sekretaris Badan langsung nah Sekretaris Badan langsung seharusnya memberikan surat keputusan khusus kalau memang mau fokus untuk pengelolaan perpustakaan, memang itu sudah dikasih jadwal piket siapa yang bertugas tapi itu hanya surat keputusan internal bukan surat keputusan sekretaris badan yang mewakili 1 (satu) BSK ibaratnya perintah dari unit itu tidak ada dan pengendalian petugas pegawai otomatis tidak punya kewenangan, jadi memang tidak punya kewenangan karena hanya disuruh menjaga menepati tetapi tidak memiliki kewenangan dan tidak punya surat keputusan secara khusus yang bisa dia lakukan disitu dan profilnya masih kurang pengawasan pengendalian dari kita.

Kemudian terakhir opini itu balik lagi 1 (satu) kesinambungan hasil penelitian dan pengkajian karena memang di opini itulah jadi 3 (tiga) pelayanan publik kita tersosialisasi, misalnya dia megampu 1 (satu) penelitian pengkajian dia ketuanya atau dia anggota yang aktif atau anggotaa yang tersosialisasikan melalui opini itu disosialisasikanlah hasil penelitian pengkajian kita, maka dari itu kenapa namanya opini kebijakan karena memang dari tahun kemaren kita sudah tidak melakukan penelitian lagi tapi memang melakukan kajian yang berbasis permintaan dari internal untuk naskah akademik atau naskah pra kebijakan sebelum tersusunya Peraturan Menteri Hukum dan Ham. Jadi kenapa kita sudah menyusun seperti itu dan narasumber dari anggota pengkajian penelitian juga kemudian disosialisasikan melalui opini jadi 1 (satu) berkesinambungan kalau misalnya apa

yang dia ungkapkan atau berikan terbatas hanya dengan sekup pengkajian penelitian yang kita lakukan makanya risikonya kurang, karena memang seginya dari segi internal kita analisa dari pengkajian itu. Yang kedua risikonya juga kurangnya pendapat atau minimnya kewenangan atas tulisan itu karena memang terbatas kalau peneliti itu seluas-luasnya apa yang dia dapat dari pengumpulan data lapangan itulah yang diungkapkan dalam tulisannya maupun diungkapkan dari segi dia berbicara tapi kalau dari segi pengkajian apalagi internal skopnya nanti outputnya dalam bentuk Peraturan Menteri batasannya sudah menjadi spesifik atau menjadi internal tidak bisa dikaji lagi, mungkin komperansif perbandingan dari setiap KL kita lakukan lagi dan diadain lagi kajian itu ada didalam hasil omongan narasumber dalam opini kita sosialisasikan, kalau hal-hal sensitif tidak bisa ikut lebih dalam atau disensor didalam opini tersebut. Memang sudah ketentuan jika ada yang melanggar dari apa yang sudah dia tulis dari penelitian pengkajian berarti ini ada sesuatu, karena memang ini hal yang sensitif jangan sampai masyarakat tahu dan penyelenggaranya kanwil meyebarluaskan ke masyarakat untuk di ikut sertakan semakin banyak peserta yang ikut semakin bagus dan memang hanya beberapa pilihan tidak semua kajian penelitian kita mensosialisasikan opini ini dan untuk hal-hal yang sensitif biasanya tidak jadi untuk bahan opini.

Untuk anti gratifikasi dan korupsi kaya misalnya perjalanan dinas itu kebanyakan melakukan IKM, Indeks, terus kebetulan dijadiin salah satu unit yang memang memegang aplikasi survei untuk membantu dalam zona integritasnya, kalau kita kekanwil melakukan perjalanan dinas kadang-kadang ada beberapa kanwil yang masih berfikir kita memberikan oleh-oleh tapi kalau dimaksud gratifikasi itu yang diatas 300 (tiga ratus) ribu itu yang dimaksud gratifikasi, kalau kita dikasih lebih dari 300 (tiga ratus) ribu kita wajib melaporkan tapi memang ada yang suka memberi secara tidak langsung seperti menarukan di dalam tas kita itu yang menjadi salah satu risiko anti gratifikasi dan sebenarnya kita sebagai IPK-IKM yang punya tools atau aplikasi IPK-IKM otomatis kita diberikan gratifikasi padahal itu IPK-IKM (Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat) kadang tidak benar juga yang memberikan tujuan kita supaya anti gratifikasi dan anti korupsi tiba-tiba dikasih untuk korupsi itulah bentuk-bentuk hal yang ingin dipermudah, diperlancar, karena memang kita bukan segi yang langsung melayani masyarakat tapi kalau mereka itu langsung melayani masyarakat dikanwil. Kanwil itu dibawah Kemenkumham itu kemasyarakatan dan imigrasi yang mana langsung terjun kemasyarakat otomatis lumayan susah untuk mereka mendapatkan zona integritas, tapi itu semua balik lagi pemenuhan

data dukung bagaimana cara pimpinan bisa nyerahin pegawai-pegawainya itu tapi itulah yang terjadi gimana caranya dia dipermudah padahal kita juga tidak bisa mempermudah juga, kita hanya punya *tools* aplikasi untuk mereka melakukan survei dan membantu mereka untuk mengetahui kekurangan mereka dari masyarakat bukan kita malah disuruh gratifikasi. Jadi mereka yang memberikan kepada kita disaat perjalanan dinas atau bisa saja mereka niatnya memang memberikan tetapi kelebihan dari apa yang mereka berikan sehingga menimbulkan gratifikasi, karena kita sudah WBK dan statusnya juga sudah WWBM kita harus menjaga nama BSK, sedikit saja kesalahan nanti jadi teguran atau jadi turun padahal kita sudah menerima intensif, WBK-WWBM sudah cukup untuk tidak korupsi lagi dan memang tidak ada peluang korupsi karena kita tidak punya pelayanan masyarakat sehingga celah untuk korupsi disini kecil, sebenarnya semua yang ada risiko disini kecil memang anggaran kita terbatas tidak sebesar unit-unit teknis lain, kita unit yang termaksud 3 (tiga) terkecil yang mendapatkan anggaran.

Pengadaan barang dan jasa setiap unit mempunyai anggaran pengadaan barang dan jasa kaya barang-barang rumah tangga disini, misalnya laptop, kursi, meja, sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang untuk pegawai bisa bekerja dan sebenarnya kita sudah menggunakan produk dalam negeri, produk nasional, bangga buatan Indonesia jadi itu sudah aturan dan kita harus pakai itu paling risiko yang ditimbulkan karena kita menggunakan produk nasional otomatis mungkin dari segi BMN (Barang Milik Negara) kaya kita minjam mobil di barang milik negara mereka sudah punya aplikasi, yang kedua kalau kita minta barang sudah ada aplikasinya dari RKPP sendiri. Sebagai contoh ada vendor kenalan atau pegawai karena balik lagi semua di acc oleh pimpinan mau pake barang ini atau tidak apalagi beda pimpinan beda *style* atau konsep terhadap barang-barang yang akan digunakan. Kemaren tahun 2022 masih PLT sekarang udah devinitif, jadi paling pemilihan vendor terkait pengadaan barang atau jasa dari pilihan pimpinan atau kenalan pimpinan, tapi kalau sekarang sudah bangga dengan buatan Indonesia yang mulai bagus kualitasnya, kalau dulu kita masih bisa ambil merek-merek dari luar sekarang minimal merek yang terbuat dari Indonesia. Jadi memang untuk anggaran itu besar dan memang basah sekarang sudah terkendali dengan adanya kita minjam mobil saja itu sudah menjadi tanggung jawab kita sendiri atau barang hilang dan sebagainya.

Peneliti : Seberapa besar pengaruh Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi pada ketercapaian tujuan dan sasaran yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham?

Informan : Biasanya tergantung karena ada tingkatannya, jadi tergantung skala berapa per berapa itu ditentukan. Untuk masalah ini selebihnya mempunyai teori tapi saya kurang begitu paham.

Peneliti : Apakah manajemen risiko dibutuhkan untuk dapat menangani permasalahan tersebut?

Informan : Iya dibutuhkan, jadikan sebenarnya risiko itu kan masalahnya berarti manajemen gimana pintar-pintar kita melihat apa yang terjadi dan memperkirakan apa yang terjadi dari suatu kegiatan tersebut. Maka lumayan efektif untuk bisa menangani permasalahan tersebut.

Peneliti : Bagaimana penanganan yang dilakukan untuk mengevaluasi risiko-risiko pada permasalahan tersebut?

Informan : Evaluasi risiko menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil evaluasi risiko. Hasil evaluasi risiko berisikan urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani, dan menentukan indikator risiko. Dalam menentukan indikator risiko dilakukan menentukan toleransi risiko yang berisi frekuensi dan dampak yang diharapkan atau dapat diterima sesuai kategori kriteria risiko, dan menentukan indikator risiko yang mempunyai pernyataan kuantifikasi indikasi akan terjadinya penyebab sisa risiko dan batas aman dalam melakukan penanganan risiko.

Peneliti : Seberapa besar sumber potensi risiko yang terjadi di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?

Informan : Kalau dari segi layanan publik sama segi gratifikasi itu beda kaya penanggulangan risikonya kaya tadi yang aku sebutin satu persatu dari pelayanan pengkajian, misalkan penelitian dan pengkajian risikonya jika tidak dimanfaatkan rekomendasinya dari kita berarti kita musti menyamakan persepsi lagi apakah yang kita teliti ataupun yang kita kaji ini pengumpulan data lapangannya sudah valid atau belum. Jadi lebih ke perbaikan sumber daya manusia, sama kalau untuk pelayanan publik karena pasti kesalahannya balik lagi ke SDM kita ke pegawai-pegawai kita yang melayani dan berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Kalau soal anti gratifikasi itu balik lagi ke masing-masing pegawai yang misalnya melakukan perjalanan dinas dan juga peran pimpinan karena memang kalau soal anti gratifikasi sama pengadaan barang dan jasa erat kaitannya dengan pimpinan balik lagi keputusan yang menentukan untuk menggiring kita ke dalam hal bagus atau bisa menggiring kita ke hal-hal yang memberikan contoh kepada kita dengan mendukung program yang kita lakukan, itu mewakili pokja pengawasan yang mengurus soal anti gratifikasi setiap tahun kita selalu ngajarin sosialitas anti gratifikasi

dengan narasumber dari aplikasi mungkin bisa menjadi penguatan selain dari sisi pimpinan itu juga pimpinan mendukung kita untuk ngadain sosialisasi berarti sudah disposisi pimpinan terus kita menyelenggarakan melalui pokja pengawasan. Salah satu pokja dari 6 (enam) pokja yaitu integritas ada manajemen perubahan tapi paling berperan penting dalam anti gratifikasi maupun pengaduan, menanggapi seluruh pengaduan, saran dan kritik dari masyarakat dalam pelayanan publik kita, kan kita tidak menyediakan kotak saran dan kita punya pelayanan pengaduan, nah pelayanan pengaduan selalu harus aktif menanggapi apa komenan juga kanal-kanal aduan lainnya seperti lapor itu yang kelola dari kominfo, nah itu termaksud kanal-kanal aduan yang memberikan *feedback* ke masyarakat yang memberikan *feedback* terkait layanan pasti harus selalu mendengarkan kekurangan dari kita itu bagian dari risiko yang kita hadapi. Kalau soal anti gratifikasi pimpinan harus mengadakan penguatan-penguatan karena bukan dari sisi kepintaran saja yang pegawai itu bisa bekerja tapi juga dari sisi emosional *pasion* seorang pegawai SDM. Dibawah ini dia juga bisa memberikan penguatan, bagaimana disposisi menyelenggarakan sosialisasi tentunya kita indentifikasi dulu apa saja yang kira-kira apa yang terjadi. Makanya diperlukan *breifing* terlebih dahulu supaya tidak salah, supaya info-info mudah terserap oleh masyarakat dan untuk meningkatkan opini positif masyarakat. Karena memang bukan dari pimpinan yang membuat kita menerima gratifikasi tapi dari kita sendiri yang salah.

Peneliti : Bagaimana cara menghindari jika terdapat risiko yang tinggi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?

Informan : Jadi palingan kalau kita sudah tahu risiko apa yang terjadi ini dalam pengadaan pengkajian berarti harus punya alternatif rekomendasi lain yang kira-kira bisa juga dilakukan jadi kita punya 2 (dua) alternatif yang bisa kira-kira diterima dan yang sekarang diterima begitu juga kalau soal perencanaan balik lagi kalau sudah rencana kegiatannya apa itu sudah bisa mengira-ngira apa yang akan terjadi, cara menghindarinya paling dengan alternatif rekomendasi lain yang bisa kita lakukan untuk menghindari tidak diterimanya rekomendasi itu, terus kalau soal jurnal palingan kita punya aplikasi-aplikasi untuk orang masukin jurnal-jurnal, lalu *e-book*. Jadi tidak setiap tahun orang itu yang menjadi pengelola tapi tahun ini kita acak supaya lebih tepat kepada siapa yang menjadi pengelola jurnal otomatis tidak diskriminasi kepada orang terdekat (internal) atau kepada pegawai pengelola jurnal, begitu juga perpustakaan harus ada yang piket dan juga ada penguatan pengendalian melalui SK (Surat Keputusan), kalau soal opini kebijakan itu kaitannya sama peneliti pengkajian

kalau kita sudah kuat rekomendasinya dan kita punya alternatif lain sebenarnya bisa teratasi semua. Soalnya risiko disini sudah enak karena balik lagi lingkungan disini juga tidak yang luas banget. Jadi cara menghindarinya kita harus identifikasi masalah tersebut kalau kita sudah tahu berartikan kita sudah tahu celahnya untuk menghindarinya atau pake rekomendasi lain.

Peneliti : Apakah terdapat cadangan risiko yang terjadi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi di Balitbangkumham?

Informan : Pasti tentunya ada cadangan-cadangan setiap risikonya, jika tidak bisa dikendalikan maka kita akan mencari rekomendasi cadangan yang lain. Contoh untuk risiko atas layanan publik bisa menunjuk narasumber yang dapat menguasai isu-isu terkait penelitian, lokus dan subtransi. Sedangkan risiko anti gratifikasi dan korupsi, misalnya dengan melakukan pemantauan dan monev terhadap kegiatan atau kajian, jika terdapat rekomendasi yang tidak berjalan dengan semestinya kita akan mengevaluasi SOP yang ada.

Peneliti : Apakah terdapat kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang menangani Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?

Informan : Iya itu kaya kita pakai SOP alur penelitian dan pengkajian seperti apa terus kalau kita ikut surat edaran yang berlaku secara teknis dari bagian TL itu bisa dikoordinasi. Kalau misalnya anti gratifikasi untuk kebijakan ini kita punya. Skting abis orang gratifikasi orang rujukan. Skting itu pemikat yang untuk siapa saja bisa menyelidiki pengelola gratifikasi, pengelola pengaduan masyarakat, nah orang seperti itu justru bisa mengendalikan dan memberikan informasi kepada pimpinan dan menanyakan kebijakan yang tepat. Jadi pimpinan sudah memberikan ruang *space* pegawai menyelesaikan masalah tapi kalau tidak bisa diselesaikan kita juga punya pengaduan yang melibatkan pimpinan untuk memberikan solusi karena memang casenya macem-macam casenya apa dulu yang diadukan, misalnya gratifikasi pasti bisa melibatkan pimpinan, pasti juga dibidang mana yang salah, di pusat mana yang salah, BSK banyak ada Puslodayin, Puskum, Pusjianbang. Kalau mau yang berlaku paling alurnya yang sudah dibuat, sudah ada dalam bentuk SOP alur kerja kita sudah ada semua.

Peneliti : Apakah kebijakan tersebut dapat mengendalikan berjalannya suatu manajemen risiko?

Informan : Jadi kebijakan ini ada dibawah pimpinan, tapi kalau ada permasalahan yang sudah di risikokan dan secara tiba-tiba pasti sudah ada kebijakan dan pimpinan mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan risiko tersebut.

Peneliti : Bagaimana perencanaan reaksi yang dilakukan untuk dapat memulihkan kondisi dari dampak risiko tersebut?

Informan : Iya paling kalau terjadi otomatis kita harus bisa melakukan ke SOP awal kita lihat SOP yang tidak benar, yang tidak benar itu dibagian SDM kah atau aturannya yang menimbulkan celah untuk dilanggar, atau balik lagi kita menelaah ulang risiko yang tidak terduga itu asal sumbernya dari mana apakah dari segi SOP yang tidak benar, atau segi SDM yang tidak mau melakukan. Nah dari situ kita melakukan perbaikan, dan penegoran. Kalau misalkan dari segi teknis alur kita yang tidak benar berarti kita yang memberikan metodenya apa untuk memperbaikinya.

Peneliti : Bagaimana perencanaan aksi jika terdapat risiko yang tidak terduga?

Informan : Iya memang banyak yang bakalan tidak terduga, misalnya kaya kita kira-kira bisa pas atau di rekomendasikan atau kaya kita bisa ngerasa di perpustakaan tuh kayanya tidak masalah kita kasih orang ini pinjem buku, kayanya bukan orang yang gimana, dan kita juga sudah sesuai SOP atau kita sudah kenal dengan orangnya dan tanpa kita meminta identitasnya. Balik lagi memang tidak semua orang pada karakter yang sama seperti itu dan tidak semua orang dengan kondisi yang stabil-stabil aja, bisa saja teman dekat kita sendiri tidak mengembalikan bukunya karena faktor kedekatan jadi itu contoh kecil yang bisa menimbulkan risiko tapi tidak begitu besar.

Peneliti : Bagaimana tahapan pelaporan yang dilakukan terhadap risiko yang terjadi?

Informan : Menurut saya laporan yang ada di risiko - risiko Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia itu di monitoring.

Peneliti : Apakah terdapat pemantauan yang dilaksanakan terhadap proses manajemen risiko tersebut?

Informan : Apa yang saya katakan laporan dan pemantauan di monitoring. Tapi saya kurang tahu begitu detainya karena bukan dibidang saya.

TRANSKIP

WAWANCARAINFORMAN 3

Informan Penelitian : Bendahara Pengeluaran Badan Strategi Kebijakan
Tempat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hari dan Tanggal : 4 Juli 2023
Waktu : 07.00 - Selesai

Peneliti : Bagaimana tahapan proses identifikasi risiko yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham?

Informan : Jadi pelaksanaan risiko di Balitbang kalau sekarang Badan Strategi Kebijakan mengacu pada Permenkumham No.5 Tahun 2018, jadi untuk level tingkat Kementerian kita sudah punya *guide, rance* atau tata cara untuk melaksanakan manajemen risiko baik dari identifikasinya sampai tahap pelaporan. Di Balitbang sendiri itu menggunakan 3 (tiga) metode. Pertama *monev* (monitoring evaluasi) kita rapatkan lintas seluruh bagian Balitbang dari pusat maupun sekretariat untuk menyampaikan kendala atau masalah yang dihadapi terkait tuis mereka, jadi kita kolektif untuk mengetahui masalah-masalahnya lalu diidentifikasi tapi baru batas mengumpulkan masalah. Kedua ada *brainstroming* biasanya kalau *brainstroming* di skala kecil dan *brainstroming* mempunyai tim MR (manajemen risiko) dan tim SPIP untuk membuktikan lebih kecil dan lebih mengerti mengenai manajemen risiko. Ketiga yang terakhir via SOP mengevaluasi SOP-SOP yang udah lama atau tahun lalu apakah sesuai kondisi yang sekarang atau tidak.

Peneliti : Terdapat risiko apa saja yang ada di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?

Informan : kebetulan saya tidak terlibat langsung untuk dilayanan publik tapi saya terlibat langsung di anti gratifikasi dan korupsi. Kalau di gratifikasi sendiri kita mengidentifikasi dengan proses diantara kegiatan Balitbang yang memiliki potensi lebih besar yang menerimabarang atau berpotensi besar menerima gratifikasi mau itu secara tidak sengaja, kita menerima bukan karena kita minta tapi dikasih biasanya yang sering menerima seperti itu orang-orang yang sedang dinas utamanya itu ada di Pusjianbang karena mereka yang memegang kegiatan IPK-IKM mereka yang memiliki kepentingan di seluruh UPT di Kemenkumham. Identifikasi risikonya misalnya kita nanya ke temen-temen yang pergi dinas mereka biasanya di tawarin apa saja, atau potensi-potensi apa yang mereka sering temui, ada yang nawarin fasilitas atau bahkan

sampai kasih uang itu uang bukan ngasih tapi ditaro saja dan sampe jakarta mereka baru sadar, itu yang pertama. Kedua orang yang sering berhubungan dan memiliki kepentingan dengan pihak keuangan karena kami memegang gaji kemudian gaji melalui bank persepsi dan itu ada kepentingan untuk mengurus rekening negara dan itu ada persepsi yang kita tunjuk biasanya kita sendiri di tim keuangan. Ketiga yang terakhir ada dibagian umum ada pengadaan barang dan jasa yang paling erat dengan orang ketiga apalagi terkait dengan pengadaan biasanya untuk dapat proyek ada yang rela bahkan ada yang nawarin untuk bisa pengendalian yang kita kasih sosialisasi dikorupsi dan gratifikasi, biasanya kita tidak mungkin sosialisasi satu-satu tapi digabung. Dan ada surat kepentingan pernyataan surat yang mengatakan bukan idenpiensnya digratifikasi yang belum secara keseluruhan untuk melaksanakan pengendalian risiko di bidang anti gratifikasi dan korupsi karena kita bukan unit yang melaksanakan pelayanan publik yang langsung kepada masyarakat tapi kita stakeholders masing- masing yang biasanya udah jelas. Contohnya dibagian umum urusannya dengan pengadaan barang, keuangan dengan bank. Jadi lebih mudah dari pada langsung kemasyarakat itu lebih sulit mengendalikan.

- Peneliti : Seberapa besar pengaruh Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi pada ketercapaian tujuan dan sasaran yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham?
- Informan : Menurut saya, cukup berpengaruh dari penilaian subjektif itu yang tidak bisa dituangkan dilaporan, kalau secara objektif bagaimana cara kita melakukan pengukuran dan melakukan identifikasi risiko. Kalau kita ngomongin tercapai atau tidak cukup sulit karena harus ada kejujuran orang yang menerimaa kalau orang itu menerma tapi tidak jujur kan kita tidak tahu, hal-hal seperti itu harus di infokan.
- Peneliti : Apakah manajemen risiko dibutuhkan untuk dapat menangani permasalahan tersebut?
- Informan : Sangat perlu, ketika birokrasi pemerintah maksudnya kadang ketika kita melaksanakan korban itu menurut saya terlalu abstrak, karena kita tipikal orang yang melaksanakan pelayanan kemasyarakat indikator pencapaiannya tidak bisa diukur secara kuantitas mau tidak mau harus secara kualitas. Jadi kadang melaksanakan tugas ada potensi risikonya maksudnya kalau pelayanan publik nanti masyarakatnya minta cepet dia nawarin uang kepetugas tapi kita sebagai orang yang diukur pengendalian gratifikasi secara kualitas dan juga orang-orang yang jelas paling dosen instansi-instansi yang terkait dimana istilahnya secara SDM secara material tidak ada transaksi keuangan adanya kesepakatan misalnya ada 20 (dua puluh)

kebijakan-kebijakan yang akan dibahas, contohnya tim ini pengen didahulukan jadi ada *guides* mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dengan adanya manajemen risiko ada juga point dimana penentuan lokus melibatkan pihak ketiga bisa dosen, bisa unit yang mengaku analis kebijakan.

- Peneliti : Bagaimana penanganan yang dilakukan untuk mengevaluasi risiko-risiko pada permasalahan tersebut?
- Informan : Kalau disini dilakukan secara berkala dalam manajemen risiko itu ada uraian risiko sama tingkat risiko, tingkat risikonya itu diurutkan dari yang tinggi sampai yang terendah, yang tinggi itu harus ada perhatian lebih dan penanganannya harus ekstra dibanding yang kecil bukan berarti kita mengabaikan risiko kecil tapi dalam melaksanakan risiko itu perlu. Karena kita terbatas, waktu kita terbatas yang mana yang paling urgent kita kendalikan setiap 3(tiga) bulan sekali ada evaluasi risiko.
- Peneliti : Seberapa besar sumber potensi risiko yang terjadi di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi ?
- Informan : Sangat besar, karena kalau risiko tersebut sangat tinggi itu akan mempengaruhi tujuan yang ada di Balitbang yang sedang jalankan, makanya kita harus mengendalikan risiko-risiko tersebut.
- Peneliti : Bagaimana cara menghindari jika terdapat risiko yang tinggi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?
- Informan : Balik lagi karena saya di bidang keuangan jadi yang saya tahu gratifikasi dan korupsi. Contohnya uraian gratifikasi terdapat peluang gratifikasi pada pelaksanaan hasil verifikasi pengukuran tingkat kepuasan IKM-IPK semuanya ada ukuran di skala kemungkinan dan di skala dampak dari skala kemungkinan dan dampak itu risikonya tinggi kita udah melaksanakan perencanaan aksi diawal kita menyusun perencanaan aksi untuk menurunkan risikonya salah satunya melakukan SOP tentang pelaksanaan IPK-IKM, melakukan pemantauan kegiatan *money* dan survei, survei dilaksanakan secara *online*. Jadi terarah di awal tahun sudah menentukan risiko dan pengendaliannya apa saja di triwulan kita evaluasi pengendaliannya apakah sudah terlaksana, jika sudah terlaksana apakah masih efektif karena dinamika organisasi macam-macam kadang perencanaan triwulan 1 (satu) ini sudah tidak efektif lagi karena manajemen risiko itu dinamis jadi kita tidak bisa membatasi.
- Peneliti : Apakah terdapat cadangan risiko yang terjadi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?
- Informan : Pastinya mempunyai cadangan baik risiko pelayanan publik maupun risiko anti gratifikasi dan korupsi, karena cadangan disini cukup membantu untuk menurunkan atau mengurangi risiko.

- Peneliti : Apakah terdapat kebijakan-kebijakan yang menangani manajemen risiko yang dilakukan?
- Informan : Ada pastinya hampir setiap kebijakan di manajemen risiko itu ada *guides* selain daripada SOP itu sendiri, misalnya kita melaksanakan SOP yang sudah ada urutannya menganalisis kebijakan dimulai penelitian lokus, *brainstroming* dengan adanya *stakeholders* sampai akhirnya pada analisis kebijakan dengan manajemen risiko. Manajemen risiko itu ada ukurannya misalnya triwulan ini tercapai, tapi triwulan ini tidak tercapai dengan manajemen risiko itu pimpinan jadi mikir melanggar atau tidak, sesuai tidak dengan aturan yang kita buat. Jadi dengan adanya manajemen risiko ini tentu saja bisa menjadi dasar untuk pimpinan mengambil keputusan.
- Peneliti : Apakah kebijakan tersebut dapat mengendalikan berjalannya suatu manajemen risiko?
- Informan : Pastinya membantu untuk mengendalikan manajemen risiko yang ada di Balitbang itu sendiri.
- Peneliti : Bagaimana perencanaan reaksi yang dilakukan untuk dapat memulihkan kondisi dari dampak risiko tersebut?
- Informan : Sejauh ini saya memandang manajemen risiko di Badan Strategi Kebijakan berjalan amat baik, bahkan kita pernah menjadi percontohan inspektorat jenderal untuk penanganan risiko yang komperatif, waktu unit eselon 1 cuman BSK yang sudah melaksanakan itu secara baik, jadi untuk dampak yang ditimbulkan itu bisa dikendalikan. Jadi dalam penangan risiko kita mengukur risiko dari skala kemungkinan dikali dampak, kemungkinan dampak itu misalnya kemungkinan bendahara menerima gratifikasi kemungkinannya seberapa besar oh sangat mungkin karena dampaknya ketika sendiri atau saya sendiri yang menerima gratifikasi berarti tidak berpengaruh kepada Balitbang.
- Peneliti : Bagaimana perencanaan aksi jika terdapat risiko yang tidak terduga?
- Informan : Iya paling kalau dari kita sendiri perencanaan aksi yang kita lakukan berbuat sebaik mungkin untuk risiko-risiko tersebut tetap stabil dan tidak terlalu banyak manajemen risiko yang kita hadapi.
- Peneliti : Bagaimana tahapan pelaporan yang dilakukan terhadap risiko yang terjadi?
- Informan : Pada tahapan laporan kita melaporkan 3 (tiga) bulan sekali, jadi di triwulan I,II,III laporannya juga sesuai dengan isi dari manajemen risiko yang ada di BSK tersebut.

Peneliti : Apakah terdapat pemantauan yang dilaksanakan terhadap proses manajemen risiko tersebut?

Informan : Untuk pemantauan di Badan Strategi Kebijakan biasanya dilaksanakan oleh unit pembina kita Inspektorat Jenderal manajemen risiko. Jadi kita melaksanakan laporan triwulan 1(satu)-4(empat) mereka ngecek laporan yang kita sampaikan. Jangan sampai laporan ada kegiatannya tidak ada, kemudian di assestment lagi laporan yang kita susun sudah sesuai atau belum dengan ketentuan manajemen risiko, karena kita bukan instansi pembina kadang ada isu-isu yang tidak disampaikan oleh kita, karena beberapa ada yang update, oh laporan ini sudah tidak boleh. Jadi pemantauan ini lebih banyak dilaksanakan di Inspektorat Jenderal, kalau di level kita masih terhadap monitoring evaluasi IPK-IKM, untuk mengetahui kegiatan MR ini sudah serti apa belum ya dari Ditjen.



TRANSKIP WAWANCARA

INFORMAN 4

Informan Penelitian : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
Tempat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hari dan Tanggal : 4 Juli 2023
Waktu : 14. 00 - Selesai

- Peneliti : Bagaimana tahapan proses identifikasi risiko yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham?
- Informan : Identifikasi yang ada di Badan Strategi Kebijakan ini biasanya kita terkait penyalagunaan tentang perjalanan dinas, setelah itu kita verifikasi semua SPJ di cek sesuai tidak dengan mereka jalankan dilapangan, seperti itu identifikasinya kalau dibagian keuangan karena saya dibagian keuangan.
- Peneliti : Terdapat risiko apa saja yang ada di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?
- Informan : Kalau di pelayanan publik itu ada dibagian humas, tapi kalau dari anggaran biasanya kita lihat dulu, salah satu contoh Ibu Diana suaminya ada diumumkan benturan kepentingannya besar, karena dibagian umum ada pengadaan barang disini bagian pembayaran kalau secara SPIP ada benturan kepentingan antar mereka suami istri, jadi kita membuat surat pernyataan bahwa mereka suami istri tidak bisa bermain untuk anggaran barang pengadaan.
- Peneliti : Seberapa besar pengaruh Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi pada ketercapaian tujuan dan sasaran yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham?
- Informan : Sangat besar, dan sangat berpengaruh pada ketercapaian tujuan dan sasaran yang ada disini.
- Peneliti : Apakah manajemen risiko dibutuhkan untuk dapat menangani permasalahan tersebut?
- Informan : Iya sangat dibutuhkan, namanya ada manajemen risiko pasti tidak menutup kemungkinan risiko itu ada, jadi kita pasti butuh.
- Peneliti : Bagaimana penanganan yang dilakukan untuk mengevaluasi risiko-risiko pada permasalahan tersebut?

- Informan : Misalkan terjadi risiko kita akan memanggil pegawainya dan kasih peringatan, kalau peringatan tidak bisa teratasi kita akan rapatkan karena kita ada tim SPIP nanti tim yang memutuskan.
- Peneliti : Seberapa besar sumber potensi risiko yang terjadi di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?
- Informan : Sumber potensi risiko disini cukup besar, karena dari pelayanan publik itu meluas atau luas dan kalau gratifikasi dan korupsi paling terjadi benturan kepentingan yang ada.
- Peneliti : Bagaimana cara menghindari jika terdapat risiko yang tinggi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?
- Informan : Kalau dari keuangan itu risikonya memang tinggi dari sisi korupsinya, sisi penyogokannya. Kalau disini selalu saya tekankan kita tidak boleh ketemu pihak ketiga dengan pegawai yang selain kitatunjuk itu tidak boleh, jadi kita disini terkait anggaran sudah kita tunjuk surat keputusan dipusat mana orangnya, jadi selain itu kita tidak melayani karena menghindari risiko-risiko yang tinggi.
- Peneliti : Apakah terdapat cadangan risiko yang terjadi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?
- Informan : Cadangan disetiap masing-masing risiko sudah pasti disediakan, jadi biar tidak stuck disitu-situ saja.
- Peneliti : Apakah terdapat kebijakan-kebijakan yang menangani manajemen risiko yang dilakukan?
- Informan : Pasti ada kebijakan-kebijakan tersebut. Karena kita ada rapat pertriwulan terkait tentang risiko yang bakal berdampak.
- Peneliti : Apakah kebijakan tersebut dapat mengendalikan berjalannya suatu manajemen risiko?
- Informan : Seharusnya bisa untuk mengendalikan manajemen risiko yang ada disini, tapi kita lihat lagi pemilik-pemilik risiko yang menjalankan.
- Peneliti : Bagaimana perencanaan reaksi yang dilakukan untuk dapat memulihkankondisi dari dampak risiko tersebut?
- Informan : Mungkin kita selalu mengundang KPK,BPK, itu terkait risiko-risiko gratifikasi korupsi, mereka selalu kasih himbauan-himbauan atau saran dibidang kita, kalau risiko seperti ini akan berdampak seperti itu tapi intinya kita sosialisasi kepada pegawai dari unit KPK dan BPK
- Peneliti : Bagaimana perencanaan aksi jika terdapat risiko yang tidak terduga?
- Informan : Jika terdapat risiko yang kita tidak duga dan muncul tiba-tiba paling akan kita rapatkan lagi bersama tim-tim pemilik risiko tersebut.

Peneliti : Bagaimana tahapan pelaporan yang dilakukan terhadap risiko yang terjadi?

Informan : Pelaporan disini ada tim yang memegang terkait laporan, jadi laporan itu kita kumpulkan nanti kita bahas dengan kapus, kalau ada laporan seperti ini nanti kapus memberi arahan-arahan.

Peneliti : Apakah terdapat pemantauan yang dilaksanakan terhadap proses manajemen risiko tersebut?

Informan : Paling kita pantau sejauh mana risiko-risiko tersebut berjalan, jika memang sudah sangat tinggi akan dikasih arahan atau cadangan dan bisa juga kita hindari risiko tersebut.



TRANSKIP WAWANCARA

INFORMAN 5

Informan Penelitian : Tim Anggota Pokja Pengawasan
Tempat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hari dan Tanggal : 31 Mei 2023
Waktu : 11.00 - Selesai

Peneliti : Bagaimana tahapan proses identifikasi risiko yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia?

Informan : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham pada saat itu berubah menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Ham. Jadi manajemen risiko itu ada suatu siklus yang pertama dilakukan adalah identifikasi yang dimana awalnya kita tahu dulu visi misi dari organisasi, pencapaian tujuan seperti apa yang sedang berjalan. Untuk pencapaian hasil rekomendasi dari hasil saat itu mungkin masih kajian penelitian 2022 kalau sekarang sudah analisis kebijakan, hasilnya berupa rekomendasi kepada isu-isu yang dibutuhkan, misalnya Ditjen Pemasarakan tentang lapas-lapas kenapa napa-napinya begitu terus, bagaimana caranya napa mendapatkan hak-haknya, apa kira-kira rekomendasi kita untuk memecahkan masalah-masalah itu. Ketika kita melakukan pemetaan setiap organisasi kita harus melakukan pemetaan dulu, jadi kira-kira kita meramal atau mengira-ngira ketika kita mencapai tujuan, apa saja hambatannya, apa saja risiko yang kita hadapi. Kalau di Balitbang sendiri ada 3 (tiga) hal. 1 (satu) tusi, tusi itu adalah kegiatan sehari-hari yang kita lakukan secara operasional terus-menerus, disini kita sudah melakukan pemetaan tim yang akan kita peroleh apa saja risikonya nah ini ada banyak. Kalau untuk tahun 2022 untuk tusi ada 19 (sembilan belas) risiko dari hasil identifikasi risiko salah satunya kegiatan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan jadi mengakibatkan revisi anggaran yang terus menerus. Misalkan Balitbang menyusun anggaran 1(satu) tahun sebelumnya ketika tahun 2024 kita mengajukan untuk renovasi ruangan ketika berjalan tiba-tiba kebijakannya tidak harus renovasi ruangan otomatis ada suatu perbedaan antar perencanaan sama pelaksanaannya, dan ada salah satunya lagi rekomendasi hasil penelitian tidak seluruhnya dimanfaatkan, kan kita mengharapkan di manfaatkan dan ternyata hasil kajian kita ternyata harus melakukan a,b,c,d, rekomendasinya dan terdapat perbedaan pendapat. Contoh salah satunya gratifikasi adanya diskriminasi atau peluang gratifikasi dari calon penulis kepada pengurus jurnal, trus adanya peluang

gratifikasi pada barang dan jasa. Dan terakhir ada pelayanan publik ada 6(enam) risiko sedangkan gratifikasi mempunyai 7 (tujuh) risiko yang semua identifikasi risiko ada tingkatannya yaitu tinggi, sangat tinggi, sangat rendah, dan rendah. Ketika kita udah tau tingkatan risiko kita harus buat rencana tindak pengendaliannya apa, kira-kira apa saja pengendaliannya untuk risiko ini.

Peneliti : Terdapat risiko apa saja yang ada di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?

Informan : Kalau untuk Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi ada 7 (tujuh) risiko sedangkan Risiko Atas Pelayanan Publik ada 6 (enam) risiko, nah ini bisa dengan cara pemetaan jadi pertama itu visi misi dari pencapaian yang kita kerjakan itu apa cuma bedanya kita klasifikasikan. Kalau pelayanan publik kira-kira layanan publik yang ada di Balitbang itu kita klasifikasikan jika risiko ini ada perbenturan sama gratifikasi korupsi kita klasifikasikan cuma memang itu bisa dibilang kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan juga, dan penyebabnya banyak hal, benturan kepentingan, SOP yang belum ada, SOP ada tapi implementasinya belum berjalan dengan baik, makanya kita rumuskan pengendalian itu dibutuhkan.

Peneliti : Seberapa besar pengaruh Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi pada ketercapaian tujuan dan sasaran yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham?

Informan : Ketika pencapaian tujuan kita sudah mengetahui permasalahannya barulah kita menyatakan risiko itu ada loh, ketika pencapaian tujuannya tidak di masukin ke dalam risiko yang saya bilang kayanya itu kecil deh, contoh kurangnya minat pengunjung layanan perpustakaan kita bisa saja memasukan kedalam risiko karena memang kita kurangnya pengunjung *offline* dan jaman sekarang baca buku bisa lebih mudah membaca *online* melalui *smartphone* atau media elektronik lainnya, dan layanan perpustakaan kita menjadi sepi pengunjung buat apa kalau tidak ada tamunya mau ngapain. Jadi kita masukan ke dalam risiko yang harus kita tangani karena untuk kita berfikir lebih inovasi.

Peneliti : Apakah manajemen risiko dibutuhkan untuk dapat menangani permasalahan tersebut?

Informan : Iya butuh banget, makanya kita harus *manage* risiko ya karena kitabutuh. Risiko yang ada kalau kita tidak *manage* gimana kita mau bisa kelola atau mengendalikannya. Makanya manajemen risiko disini sangat dibutuhkan untuk menangani permasalahan.

Peneliti : Bagaimana penanganan yang dilakukan untuk mengevaluasi risiko-risiko pada permasalahan tersebut?

Informan : Jadi kita sudah memetakan indikator risiko yang kita sudah sebutkan mana sih prioritas yang kita kerjakan pastikan yang paling tinggi nomor 1 (satu) sampai yang sangat rendah nomor 7 (tujuh), ketika kita sudah tau penanganannya yang tepat ini mau mengurangi, menurunkan atau menghilangkan risiko tersebut. Jika kecil bisa nih kita hilangkan karena tidak terlalu mengganggu dan bukan suatu risiko yang sangat berpengaruh, jadikan ada suatu risiko yang kayanya tidak ngefek kita hilangkan proses pengendalian ini bukan suatu masalah buat organisasi, ada yang wah ini bakal terjadi masalah besar ada yang seperti itu. Jadi setelah itu kita tetapkan penanggung jawabnya jadi kita tahu risikonya apa, kriteria risiko itu seperti apa kita prioritaskan jika sangat tinggi dan bisa dikurangi atau dialihkan ke internal atau eksternal dan ada satu lagi menerima dengan ikhlas.

Peneliti : Seberapa besar sumber potensi risiko yang terjadi di Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?

Informan : Jadi kalau kita melakukan manajemen risiko itu ada dasarnya pada Permenkumham No 5 Tahun 2018 disitu ada pencapaian tujuan kira-kira apasih indikator kerjanya, pertama kita ingin melakukan apa nah ini permasalahannya apa sehingga kita sudah ada pernyataan risikonya berupa apa, penyebabnya apa pasti banyak hal, dampaknya apa sampai dampaknya kita petakan. Ini yang saya bilang pengendalian intern ketika sudah ditentukan kita petakan dan kita mengklasifikasi risiko tinggi, sedang, dan rendah kita sudah tau juga kode-kode warnanya. Disini ada rumusnya, perhitungannya kenapa kita bisa dapat rendah tinggi dan segala macam dari kemungkinan semua dampak. Jika risiko kemungkinan kecil ini ada kode-kodenya nah dampaknya apa dari rendah pegawai sampai Kementerian itu 5 (lima) ketika ini dikali ada yang semakin besar 25 (dua lima), 5 (lima) kali 5 (lima) jadi ada klasifikasi rens antara hasilnya sekian sama sekian.

Peneliti : Bagaimana cara menghindari jika terdapat risiko yang tinggi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?

Informan : Di penanganan risiko kita sudah tetapkan, jadi risiko disini mau kita apain otomatis harus ada hasilnya kita *manage* nah mungkin penanganannya disitu kita pilih di Permenkumham ada pilihan untuk risikonya mau diapain. Jadi ada beberapa pilihan mengurangi kemungkinan atau mengurangi dampak. Kemungkinan sama dampak itu beda kemungkinan itu terjadinya jarang tapi kecil, sedangkan dampak itu penerima dampaknya yang terjadi.

- Peneliti : Apakah terdapat cadangan risiko yang terjadi pada Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?
- Informan : Sebagaimana kita ketahui bersama cadangan risiko akan dilihat seberapa banyak dan tinggi tingkat risiko yang ada. Untuk itu kita perlu kiranya keseragaman dan pemahaman pada risiko itu.
- Peneliti : Apakah terdapat kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang menangani Risiko Atas Layanan Publik dan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi?
- Informan : Kebijakan dari Balitbang itu sendiri ada SKKBAN, SK itu kan kebijakan, SK ini surat keputusan yang salah satu kebijakan untuk menangani, kalau dari sisi pimpinan yang keliatan si surat keputusan terus nanti ada piagam, piagam itu di tanda tangani oleh Kepala Badan jadi piagam ini menyatakan bahwa pelaksanaan proses yang melibatkan seluruh koordinator manajemen risiko. Intinya pemetaanya sudah berjalan dengan proses perencanaan risikonya akan dilaksanakan semua jajaran.
- Peneliti : Apakah kebijakan tersebut dapat mengendalikan berjalannya suatu manajemen risiko?
- Informan : Kalau untuk kegiatan pengendalian itukan suatu kebijakan nanti ada per-risiko, untuk lebih lanjut saya kurang begitu paham.
- Peneliti : Bagaimana perencanaan reaksi yang dilakukan untuk dapat memulihkankondisi dari dampak risiko tersebut?
- Informan : Itu ada istilahnya kontigensi, risiko kontigensi maksudnya suatu risikoyang diluar yang kita petakan dan tidak kita masukan ke daftar surat keputusannya. Jadi kita sudah daftar nih sampai 6 (enam) ternyata tiba-tiba ada risiko yang muncul diluar dari risiko ini, itu ada bahasanya risiko kejadian penting yang terjadi.
- Peneliti : Bagaimana perencanaan aksi jika terdapat risiko yang tidak terduga?
- Informan : Sebagai contoh covid tidak mungkin covid kita rencanakan, ketika covid terjadi kegiatan semua pegawai otomatis menjadi *work from house* nanti ada beberapa pimpinan yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan, terus nanti ada kebijakan pengumpulan data melalu zoom.
- Peneliti : Bagaimana tahapan pelaporan yang dilakukan terhadap risiko yang terjadi?
- Informan : Jadi pelaporan itu di buat laporan secara berkala. Sebenarnya laporan ini setahun sekali hanya diakhir tahun tapi di Badan Strategi Kebijakan sendiri kami pikir masasih risiko itu dipantaunya sekali jadi kita lebih mendalami lagi setiap triwulan kita aturkan lagi. Jenis laporan yang kita laporkan itu ada 2 (dua) laporan manajemen risiko triwulan dan laporan manajeme risiko evaluasi, laporan manajemen

risiko 1(satu), 2 (dua) ,3(tiga), 4(empat) itu sekaligus kita melakukan pelaporan SPIP. SPIP dan manajemen risiko adik kaka jadi maksudnya tidak bisa dihilangkan tapi MR ini setiap triwulan kita buat semester 1(satu) dan semester 2 (dua) jadi ada updatenya dan terakhir laporan tahunan kita laporkan ke unit Sekretarian Jenderal sma Inspektorat Jenderal.

Peneliti : Apakah terdapat pemantauan yang dilaksanakan terhadap proses manajemen risiko tersebut?

Informan : Pemantauan risiko yang kita lakukan dituangkan per triwulan.



Lampiran 3 Dokumentansi

DOKUMENTANSI

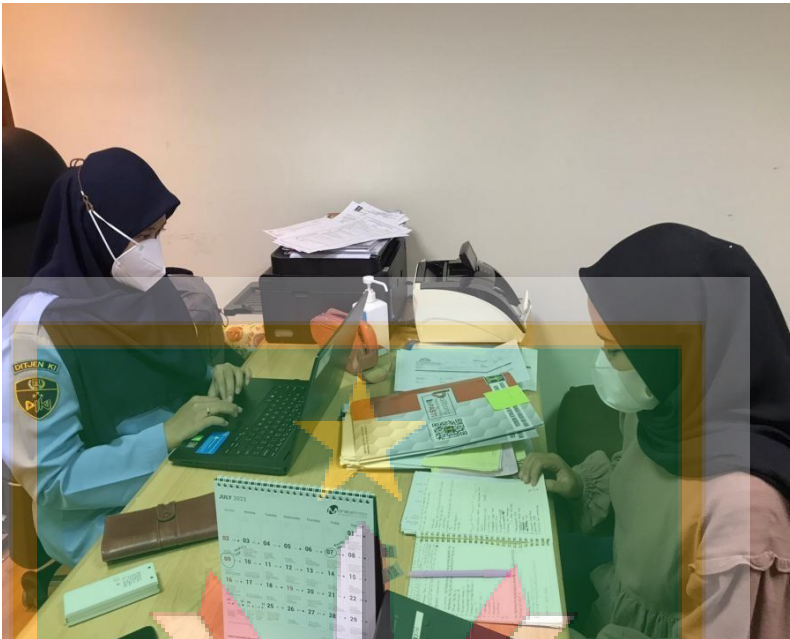
1. Wawancara dengan Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



2. Wawancara dengan Sekretaris Pokja Pengawasan



3. Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Badan Strategi Kebijakan



4. Wawancara dengan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda



5. Wawancara dengan Anggota Tim Pokja Pengawasan



Lampiran 4 Data

Data Mengidentifikasi Risiko 1 (satu)

Daftar Risiko Atas Layanan Publik Balitbangkumham Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Hasil pengumpulan data di lapangan tidak relevan/sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan	Terdapat peluang gratifikasi pada pelaksanaan pengumpulan data lapangan sehingga hasil temuan/data yang diperoleh oleh Tim Peneliti tidak relevan dan valid dengan data lapangan	Kapuslitbang Hukum, Kapuslitbang HAM, Kapusjianbang, Kapusbangdati, Peneliti	Adanya budaya "tidak enakan" pada pegawai saat diberikan "oleh-oleh" pada saat pengumpulan data di lapangan	Internal dan Eksternal	C/UC	- Hasil pengumpulan data bisa saja tidak relevan dengan kondisi riil yang ada di lapangan - Berpengaruh pada laporan hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan	1. Kepala Balitbang Hukum dan HAM 2. Para Eselon II di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM 3. Peneliti	- Melakukan pemantauan dan monev terhadap kegiatan penelitian/ kajian - Penunjukan reviewer dalam melakukan review pada setiap tahapan dalam penelitian / kajian - Pemantauan melalui aplikasi E-Litbang - SOP tentang Pengumpulan Data Lapangan - SOP tentang Penyusunan Laporan Penelitian /Kajian - <i>Wa blast</i> kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas	Ada

No.	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dalam rangka pengumpulan data lapangan	
2.	Persentase rekomendasi hasil litbang pusat pengkaji-a dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pembentukan hukum nasional dan perumusan kebijakan	Hasil survei atau pengukuran tingkat kepuasan layanan publik IPK/IKM pada Satker tidak relevan dengan hasil/data di lapangan yang diperoleh oleh petugas survei	Terdapat peluang gratifikasi pada pelaksanaan verifikasi hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan publik IKM dan IPK pada satker sehingga hasil/data yang diperoleh petugas pelaksana verifikasi tidak relevan dan tidak valid	Kapusjianbang, Tim Survei IPK/IKM	Terdapat intervensi dari Satker terhadap hasil survei atau pengukuran tingkat kepuasan layanan publik IPK/IKM tidak sesuai dengan hasil di lapangan	Internal dan Eksternal	C/UC	Hasil survei atau pengukuran tingkat kepuasan layanan publik IPK/IKM tidak valid/ilmiah berdasarkan hasil temuan /data lapangan	1. Kepala Balitbang Hukum dan HAM 2. Kapusjianbang 3. Peneliti 4. Tim Survei IPK/IKM	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan dan monev terhadap kegiatan survei IPK/IKM oleh pimpinan - Pelaksanaan survei secara online melalui aplikasi - SOP tentang pelaksanaan survei IPK/IKM - Pimpinan memberikan pembekalan kepada para petugas pelaksana verifikasi yang akan turun ke lapangan terkait dengan pengendalian gratifikasi di lapangan - <i>Wa blast</i> kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka 	Ada

No.	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										pengumpulan data lapangan	
3.	Jumlah KTI yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Terdapat peluang penerimaan gratifikasi terhadap pemberian slot/kuota pada edisi jurnal dari calon penulis kepada pengurus jurnal	Adanya perilaku diskriminasi dan peluang gratifikasi dari calon penulis kepada pengelola jurnal dalam hal penerbitan tulisan di jurnal	Kapusbangdatin, Bidang Fasilitasi Publikasi Penelitian Hukum dan HAM, Dewan Redaksi, dan Penulis Jurnal	- Penulis memiliki kepentingan untuk segera mempublikasikan tulisan - Dewan Redaksi / Pengelola Jurnal memiliki kepentingan pribadi (mendapatkan imbalan /keuntungan lainnya)	Internal dan Eksternal	C/UC	- Ketidakadilan dan ketidaksamaan perlakuan bagi calon penulis dalam publikasi tulisan di jurnal Balitbang Kumham - Menurunnya kualitas pengelolaan jurnal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan - Menurunkan kepercayaan publikasi akan proses pelayanan di Balitbang Kumham	1. Kepala Balitbang Hukum dan HAM 2. Kapusdatin 3. Bidang Fasilitasi Publikasi Penelitian Hukum dan HAM (Pengelola Jurnal) 4. Dewan Redaksi Jurnal Balitbang Hukum dan HAM	- Melakukan monitoring dan evaluasi dalam seluruh proses publikasi KTI jurnal ilmiah dengan melibatkan pengguna layanan - Menyusun dan mensosialisasikan SOP publikasi KTI jurnal ilmiah kepada pegawai dan Dewan Redaksi - Menyampaikan informasi pelayanan tidak dikenakan biaya (NO PUNGLI dan NO GRATIFIKASI) kepada pengguna layanan melalui aplikasi jurnal elektronik serta WA Business)	Ada

No.	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Presentase layanan dukungan manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Proses pengurusan kenaikan jenjang jabatan fungsional, promosi dan mutasi yang tidak transparan	Adanya peluang pungli dan gratifikasi dalam proses pengurusan kenaikan jenjang jabatan fungsional, promosi jabatan dan mutasi yang tidak memenuhi syarat	Sekretaris, Kepala Bagian Kepegawaian	- Terdapat pungli dari pihak tertentu dalam kepengurusan proses kenaikan jabatan fungsional, promosi dan mutasi jabatan	Eksternal	UC	Proses kenaikan jenjang jabatan fungsional lama, proses promosi dan mutasi jabatan tidak sesuai dengan ketentuan	1. Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM 2. Kabag Kepegawaian 3. Seluruh Pegawai	- Mengevaluasi SOP pelaksanaan promosi dan mutasi - Terdapat aplikasi asesment mandiri - Membangun database hasil asesmen sebagai <i>talent pool</i> Balitbang Kumham - Melakukan seleksi terbuka	Ada
		Proses pengadaan barang/jasa yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku	Adanya peluang korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku	Sekretaris, Kepala Bagian Umum, PPK, Pejabat Pengadaam	- Terdapat adanya suap/ korupsi dari calon penyedia /penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa	Internal dan Eksternal	C/UC	Barang/jasa yang dihasilkan dari penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi/ standar yang telah ditentukan	1. Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM 2. Kabag Umum 3. PPK 4. Pejabat Pengadaan	- SOP tentang pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku - Pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan berbasis informasi teknologi - Melakukan pendampingan dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal selaku	

No.	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										instansi pembina dalam pengadaan barang dan jasa	
5.	Persentase capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan tepat waktu	Pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan riil pengeluaran anggaran	Adanya tindak korupsi dan gratifikasi dalam pertanggung jawaban kegiatan sehingga tidak sesuai dengan riil pengeluaran anggaran	Sekretaris, Kepala Bagian Keuangan, PPK, Tim Pengelola Anggaran	- Terdapat adanya tindak korupsi dan gratifikasi dari anggaran kegiatan dalam proses pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Temuan dari pemeriksa terhadap pengelolaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan	1. Balitbang Hukum dan HAM 2. Sekretaris Balitbang 3. Kabag Keuangan 4. PPK 5. Tim Pengelola Anggaran	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran secara berkala - Penggunaan KKP dalam pelaksanaan perjadi dan pembelanjaan barang/jasa - SOP Pelaksana Anggaran - Metode pembayaran dilakukan dengan sistem transfer/LS - Verifikasi dokumen LPJ melalui konfirmasi pihak ketiga - Verifikasi berjenjang dari PPK dan PPSPM	Ada
		Pemberian honor yang tidak sesuai	Adanya penyelewengan terhadap	Sekretaris, Kepala Bagian Keuangan, PPK,	Adanya peluang gratifikasi dalam pemberian	Internal /Eksternal	C/UC	Temuan dari pemeriksa terhadap	1. Balitbang Hukum dan HAM	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	Ada

No.	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dengan anggaran yang telah ditentukan	pemberian honorarium narasumber /tim kegiatan	Tim Pengelola Anggaran	honorarium narasumber/tim kegiatan			pengelolaan dan pelaksanaan anggaran honorarium narasumber/tim kegiatan	2. Sekretaris Balitbang 3. Kabag Keuangan 4. PPK 5. Tim Pengelola Anggaran	Anggaran secara berkala - Metode pembayaran dilakukan dengan sistem transfer/LS - SOP Pelaksanaan Anggaran - Verifikasi dokumen LPJ melalui konfirmasi pihak ketiga - Verifikasi berjenjang dari PPPK dan PPSPM	



Data Mengidentifikasi Risiko 2 (dua)

Daftar Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi Balitbangkumham Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Hasil pengumpulan data di lapangan tidak relevan/sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan	Terdapat peluang gratifikasi pada pelaksanaan pengumpulan data lapangan sehingga hasil temuan/data yang diperoleh oleh Tim Peneliti tidak relevan dan valid dengan data lapangan	Kapuslitbang Hukum, Kapuslitbang HAM, Kapusjian-bang, Kapusbangdatin, Peneliti	Adanya budaya "tidak enakan" pada pegawai saat diberikan "oleh-oleh" pada saat pengumpulan data di lapangan	Internal dan Eksternal	C/UC	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengumpulan data bisa saja tidak relevan dengan kondisi riil yang ada di lapangan - Berpengaruh pada laporan hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balitbang Hukum dan HAM 2. Para Eselon II di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM 3. Peneliti 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan dan monev terhadap kegiatan penelitian /kajian - Penunjukan reviewer dalam melakukan review pada setiap tahapan dalam penelitian/kajian - Pemantauan melalui aplikasi E-Litbang - SOP tentang Pengumpulan Data Lapangan - SOP tentang Penyusunan Laporan Penelitian /Kajian - <i>Wa blast</i> kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan 	Ada

No.	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										data lapangan	
2.	Persentase rekomendasi hasil litbang pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pembentukan hukum nasional dan perumusan kebijakan	Hasil survei atau pengukuran tingkat kepuasan layanan publik IPK/IKM pada Satker tidak relevan dengan hasil/data di lapangan yang diperoleh oleh petugas survei	Terdapat peluang gratifikasi pada pelaksanaan verifikasi hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan publik IKM dan IPK pada satker sehingga hasil/data yang diperoleh petugas pelaksana verifikasi tidak relevan dan tidak valid	Kapusjianbang, Tim Survei IPK/IKM	Terdapat intervensi dari Satker terhadap hasil survei atau pengukuran tingkat kepuasan layanan publik IPK/IKM tidak sesuai dengan hasil di lapangan	Internal dan Eksternal	C/UC	Hasil survei atau pengukuran tingkat kepuasan layanan publik IPK/IKM tidak valid/ilmiah berdasarkan hasil temuan /data lapangan	1. Kepala Balitbang Hukum dan HAM 2. Kapusjianbang 3. Peneliti 4. Tim Survei IPK/IKM	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan dan monev terhadap kegiatan survei IPK/IKM oleh pimpinan - Pelaksanaan survei secara online melalui aplikasi - SOP tentang pelaksanaan survei IPK/IKM - Pimpinan memberikan pembekalan kepada para petugas pelaksana verifikasi yang akan turun ke lapangan terkait dengan pengendalian gratifikasi di lapangan - <i>Wa blast</i> kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data lapangan 	Ada

No.	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Jumlah KTI yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Terdapat peluang penerimaan gratifikasi terhadap pemberian slot/kuota pada edisi jurnal dari calon penulis kepada pengurus jurnal	Adanya perilaku diskriminasi dan peluang gratifikasi dari calon penulis kepada pengelola jurnal dalam hal penerbitan tulisan di jurnal	Kapusbangdatin, Bidang Fasilitasi Publikasi Penelitian Hukum dan HAM, Dewan Redaksi, dan Penulis Jurnal	- Penulis memiliki kepentingan untuk segera mempublikasikan tulisan - Dewan Redaksi /Pengelola Jurnal memiliki kepentingan pribadi (mendapatkan imbalan /keuntungan lainnya)	Internal dan Eksternal	C/UC	- Ketidakadilan dan ketidaksamaan perlakuan bagi calon penulis dalam publikasi tulisan di jurnal Balitbang Kumham - Menurunnya kualitas pengelolaan jurnal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan - Menurunkan kepercayaan publikasi akan proses pelayanan di Balitbang Kumham	1. Kepala Balitbang Hukum dan HAM 2. Kapusdatin 3. Bidang Fasilitasi Publikasi Penelitian Hukum dan HAM (Pengelola Jurnal) 4. Dewan Redaksi Jurnal Balitbang Hukum dan HAM	- Melakukan monitoring dan evaluasi dalam seluruh proses publikasi KTI jurnal ilmiah dengan melibatkan pengguna layanan - Menyusun dan mensosialisasikan SOP publikasi KTI jurnal ilmiah kepada pegawai dan Dewan Redaksi - Menyampaikan informasi pelayanan tidak dikenakan biaya (NO PUNGLI dan NO GRATIFIKASI) kepada pengguna layanan melalui aplikasi jurnal elektronik serta WA Bussiness)	Ada
4.	Presentase layanan dukungan manajemen	Proses pengurusan kenaikan jenjang jabatan	Adanya peluang pungli dan gratifikasi dalam proses	Sekretaris, Kepala Bagian Kepegawaian	- Terdapat pungli dari pihak tertentu dalam pengurusan	Eksternal	UC	Proses kenaikan jenjang jabatan fungsional lama, proses	1. Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM	- Mengevaluasi SOP pelaksanaan promosi dan mutasi	Ada

No.	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	an fungsional, promosi dan mutasi yang tidak transparan	pengurusan kenaikan jenjang jabatan fungsional, promosi jabatan dan mutasi yang tidak memenuhi syarat		proses kenaikan jabatan fungsional, promosi dan mutasi jabatan			promosi dan mutasi jabatan tidak sesuai dengan ketentuan	2. Kabag Kepegawaian 3. Seluruh Pegawai	- Terdapat aplikasi ases-ment mandiri - Membangun database hasil asesmen sebagai <i>talent pool</i> Balitbang Kumham - Melakukan seleksi terbuka	
		Proses pengadaan barang/jasa yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku	Adanya peluang korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku	Sekretaris, Kepala Bagian Umum, PPK, Pejabat Pengadaam	- Terdapat adanya suap/korupsi dari calon penyedia/penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa	Internal dan Eksternal	C/UC	Barang/jasa yang dihasilkan dari penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi /standar yang telah ditentukan	1. Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM 2. Kabag Umum 3. PPK 4. Pejabat Pengadaan	- SOP tentang pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku - Pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan berbasis informasi teknologi - Melakukan pendampingan dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal selaku instansi pembina dalam pengadaan barang dan jasa	
5.	Persentase	Pertanggung	Adanya tindak	Sekretaris,	- Terdapat	Internal	C	Temuan dari	1. Balitbang	- Monitoring dan	Ada

No.	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan tepat waktu	jawaban kegiatan tidak sesuai dengan riil pengeluaran anggaran	korupsi dan gratifikasi dalam pertanggung jawaban kegiatan sehingga tidak sesuai dengan riil pengeluaran anggaran	Kepala Bagian Keuangan, PPK, Tim Pengelola Anggaran	adanya tindak korupsi dan gratifikasi dari anggaran kegiatan dalam proses pelaksanaan kegiatan			pemeriksa terhadap pengelolaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan	Hukum dan HAM 2. Sekretaris Balitbang 3. Kabag Keuangan 4. PPK 5. Tim Pengelola Anggaran	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran secara berkala - Penggunaan KKP dalam pelaksanaan perjadi dan pembelanjaan barang/jasa - SOP Pelaksana Anggaran - Metode pembayaran dilakukan dengan sistem transfer/LS - Verifikasi dokumen LPJ melalui konfirmasi pihak ketiga - Verifikasi berjenjang dari PPK dan PPSPM	
		Pemberian honor yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan	Adanya penyelewengan terhadap pemberian honorarium narasumber/ tim kegiatan	Sekretaris, Kepala Bagian Keuangan, PPK, Tim Pengelola Anggaran	Adanya peluang gratifikasi dalam pemberian honorarium narasumber/tim kegiatan	Internal/ Eksternal	C/UC	Temuan dari pemeriksa terhadap pengelolaan dan pelaksanaan anggaran honorarium narasumber/tim kegiatan	1. Balitbang Hukum dan HAM 2. Sekretaris Balitbang Keuangan 4. PPK 5. Tim Pengelola	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran secara berkala - Metode pembayaran dilakukan dengan sistem	Ada

No.	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Anggaran	transfer/LS - SOP Pelaksanaan Anggaran - Verifikasi dokumen LPJ melalui konfirmasi pihak ketiga - Verifikasi berjenjang dari PPPK dan PPSPM	



Data Perencanaan Reaksi 1 (satu)

Rencana Aksi Penanganan Risiko Atas Layanan Publik Balitbangkumham

Tahun 2022

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hasil penelitian berupa tindak lanjut rekomendasi, Sitasi, Aplikasi 3AS, Sipkumham, ASA yang belum seluruhnya dimanfaatkan stakeholders	2x4=8	Mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan Permasalahan yang tepat dan strategis ke seluruh unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM - Memetakan dan mendalami permasalahan bersama stakeholder (Unit Eselon I) untuk menjadi topik penelitian - Menetapkan reviewer yang berkompeten sesuai tugas dan fungsi - Melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) tindak lanjut rekomendasi dengan stakeholder terkait - Meningkatkan, menyebarluaskan publikasi Karya Tulis Ilmiah Balitbang Hukum dan HAM dalam jurnal terakreditasi nasional dan global - Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan aplikasi 3AS, Sipkumham, ASA dalam menyangkut kinerja organisasi dan pelayanan publik - Memetakan dan menetapkan output /produk hasil litbang, rekomendasi, KTI, aplikasi survei pemanfaatan hasil 	<ul style="list-style-type: none"> - Topik/tema kajian yang sesuai dengan kebutuhan unit Eselon I terkait - Surat Keputusan penunjukan reviewer - Laporan kegiatan Monev Pemanfaatan Hasil Litbang - Kegiatan workshop / pelatihan bagi peneliti dalam menyusun rekomendasi kebijakan 	8	Jan-Des	Bagian PPL, Puslitbang Hukum, Puslitbang HAM, Pusbangdatin dan Pusjianbang	0

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				litbang - Membang-un aplikasi pengukuran pemanfaatan hasil litbang					
2	Kemampuan Narasumber belum sesuai dengan ekspektasi pengguna layanan	1x4=4	Mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya Resiko	- Mengikutsertakan peneliti/pegawai dalam rangka meningkatkan kemampuan public speaking - Menunjuk narasumber yang menguasai isu-isu terkait hasil penelitian, lokus dan substansi	- Tambahan kompetensi terkait public speaking - Surat Keputusan penunjuk-an peneliti sebagai narasumber yang disesuaikan dengan kepa-kan dan tema paparan yang disampai-kan	2	Jan-Juni	Bagian Kepegawaian	0
3	Terbatasnya pengguna layanan E-book, hanya dalam lingkup nasional dan penyebarluasan/ diseminasi/ indeksasi buku yang telah diterbitkan	2x4=8	Mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya Resiko	- Meningkatkan kemampuan pegawai (khususnya jabatan fungsional Penata Penerbitan Ilmiah) dalam hal pengelolaan publikasi ilmiah dalam level publikasi nasional maupun internasional - Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan publikasi KTI dalam level internasio-nal	- Laporan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai dalam pengelola-an publikasi ilmiah dalam level nasional maupun internasional - MoU/ kegiatan kerjasama dengan pihak lain dalam hal publikasi KTI dalam level internasional	2	Jan-Des	Pusbangdat-in	0
4	Keterbatasan lingkup publikasi jurnal elektronik	2x4=8	Mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya Resiko	- Melibatkan berbagai pihak dari luar negeri, yaitu penulis, editor dan reviewer - Mengem-bangkan kapasitas jabatan fungsional Penata Penerbitan Ilmiah dalam pengelola-an publikasi ilmiah yang berstandar Internasio-nal	- Keterlibatan penulis, editor dan reviewer dari luar negeri dalam hal publikasi jurnal - Laporan kegiatan peningkatan kapasitas jabatan fungsional Penata Penerbitan Ilmiah berstandar internasional	2	Jan-Des	Pusbangdat-in	0
5	Kurangnya minat pengguna layanan perpustakaan	1x4=4	Mengura-angi kemungkin-an dan/atau menur-un-kan dampak	- Melakukan digitalisasi terhadap produk buku sehingga bisa tersimpan	- Tersedianya buku perpustakaan Balitbang Hukum dan HAM	3	Jan-Des	Bagian Humas	0

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			terjadinya Resiko	<ul style="list-style-type: none"> dengan baik Melakukan update terhadap koleksi buku-buku perpustakaan Melakukan pengajuan anggaran BMN untuk persediaan sarana prasarana penyimpanan koleksi perpustakaan Balitbang Hukum dan HAM 	<ul style="list-style-type: none"> dalam bentuk digital Jumlah koleksi buku-buku perpustakaan bertambah Tersedia-nya rak yang memadai 				
6	Gangguan jaringan internet saat penyelenggaraan Opini dan peserta hanya dalam lingkup tertentu	1x4=4	Mengura-angi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya Resiko	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan bagian TI untuk kestabilan jaringan internet saat pelaksanaan giat Opini (Host di kantor) Streaming ke youtube agar kegiatan Opini dapat disaksikan ulang Promosi kegiatan Opini secara berkala Pegawai ikut serta dalam mempromosikan kegiatan Opini Memperluas networking 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Opini dapat berjalan dengan baik Kegiatan Opini dapat diikuti peserta lintas Kementri-an /Lembaga dan masyarakat umum 	2	Feb-Des	Bagian Humas dan Pusbangdatin	0



Data Perencanaan Reaksi 2 (dua)

Rencana Aksi Penanganan Risiko Anti Gratifikasi dan Korupsi Balitbangkumham Tahun 2022

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terdapat peluang gratifikasi pada pelaksanaan pengumpulan data lapangan sehingga hasil temuan /data yang diperoleh oleh Tim Peneliti tidak relevan dan valid dengan data lapangan	2x4=8	Mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya Resiko	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan dan monev terhadap kegiatan penelitian/ kajian - Penunjukan reviewer dalam melakukan review pada setiap tahapan dalam penelitian/ kajian - Pemantauan melalui aplikasi E-Litbang - SOP tentang Pengumpulan Data Lapangan - SOP tentang Penyusunan Laporan Penelitian/Kajian - Wa blast kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Monev pelaksanaan kegiatan penelitian/ kajian - SK Penunjukan reviewer dan form penilaian reviewer - Laporan pemantauan kegiatan litbang melalui aplikasi E-Monev - SOP tentang Pengumpulan Data Lapangan - Bukti wa blast 	6	Jan-Des	Kapuslitbang Hukum, Kapuslitbang HAM, Kapusjian-bang, Kapusbang-datin, Peneliti	0
2	Terdapat peluang gratifikasi pada pelaksanaan verifikasi hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan publik IKM dan IPK pada satker sehingga hasil/data yang diperoleh petugas pelaksana verifikasi tidak relevan dan tidak valid	2x5=10	Mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya Resiko	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan dan monev terhadap kegiatan survei IPK /IKM oleh pimpinan - Pelaksanaan survei secara online melalui aplikasi - SOP tentang pelaksanaan survei IPK/IKM - Pimpinan memberikan pembekalan kepada para petugas pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pemantauan dan monev kegiatan survei IPK/IKM - Laporan pemanta-uan survei online melalui aplikasi - SOP pelaksana survei IPK/IKM - Bukti wa blast - Dokumentasi dan notula kegiatan pembekalan oleh 	5	Jan-Des	Kapusjian-bang, Tim Survei IPK/IKM	0

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> verifikasi yang akan turun ke lapangan terkait dengan pengendalian gratifikasi di lapangan - Wa blast kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data lapangan 	pimpinan				
3	Adanya perilaku diskriminasi dan peluang gratifikasi dari calon penulis kepada pengelola jurnal dalam hal penerbitan tulisan di jurnal	3x5=15	Mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya Resiko	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi dalam seluruh proses publikasi KTI jurnal ilmiah dengan melibatkan pengguna layanan - Menyusun dan mensosialisasikan SOP publikasi KTI jurnal ilmiah kepada pegawai dan Dewan Redaksi - Menyampaikan informasi pelayanan tidak dikenakan biaya (NO PUNGLI dan NO GRATIFIKASI) kepada pengguna layanan melalui aplikasi jurnal elektronik serta WA (<i>Business</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan monitoring dan evaluasi publikasi KTI dalam bentuk jurnal ilmiah yang dipublikasikan oleh Balitbang 	3	Jan-Des	Kapusbang datin, Bidang Fasilitasi Publikasi Penelitian Hukum dan HAM, Dewan Redaksi, dan Penulis Jurnal	0
4	Adanya peluang pungli dan gratifikasi dalam proses pengurusan kenaikan jenjang jabatan fungsional, promosi jabatan dan mutasi yang tidak memenuhi syarat	1x4=4	Mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya Resiko	<ul style="list-style-type: none"> - Mengeva-luasi SOP pelaksanaan promosi dan mutasi - Terdapat aplikasi asesmen mandiri - Membangun database hasil asesmen sebagai talent pool Kumham - Melakukan seleksi terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan movev assessment mandiri melalui aplikasi - Database hasil assessment 	4	Jan-Des	Sekretaris, Kepala Bagian Kepegawaian	0

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Adanya peluang korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku	1x4=4	Mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya Resiko	<ul style="list-style-type: none"> - SOP tentang pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku - Pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan berbasis informasi teknologi - Melakukan pendampingan dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal selaku instansi pembina dalam pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kegiatan pengadaan barang /jasa melalui sistem TI - Laporan/ notula kegiatan pendampingan dan konsultasi kepada Itjen dan Setjen 	3	Jan-Des	Sekretaris, Kepala Bagian Umum, PPK, Pejabat Pengadaan	0
6	Adanya tindak korupsi dan gratifikasi dalam pertanggung-jawaban kegiatan sehingga tidak sesuai dengan riil pengeluaran anggaran	1x4=4	Mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya Resiko	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran secara berkala - Penggunaan KKP dalam pelaksanaan perjadi dan pembelian barang/jasa - SOP Pelaksanaan Anggaran - Metode pembayaran dilakukan dengan sistem transfer/LS - Verifikasi dokumen LPJ melalui konfirmasi pihak ketiga - Verifikasi berjenjang dari PPK dan PPSPM 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Monev pelaksanaan anggaran perbulan dan triwulan - Laporan penggunaan KKP dalam pelaksanaan perjadi dan pembelian barang/jasa 	6	Jan-Des	Sekretaris, Kepala Bagian Keuangan, PPK, Tim Pengelola Anggaran	0
7	Adanya penyelewengan terhadap pemberian honorarium narasumber/ tim kegiatan	1x4=4	Mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya Resiko	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran secara berkala - Metode pembayaran dilakukan dengan sistem transfer/LS - SOP Pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Monev pelaksanaan anggaran perbulan dan triwulan - SOP pelaksanaan anggaran 	5	Jan-Des	Sekretaris, Kepala Bagian Keuangan, PPK, Tim Pengelola Anggaran	0

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Angga-ran - Verifikasi dokumen LPJ melalui konfirmasi pihak ketiga - Verifikasi berjenjang dari PPK dan PPSPM					



Lampiran 5 Tanda Terima Surat Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2525015 Faksimile : 021-2526438
Laman : <http://www.balitbangham.go.id>

SURAT KETERANGAN NOMOR: PPH.1-UM.01.01-302

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jonny P. Simamora, S.I.P., M.Si.
NIP : 197312251993031001
Pangkat/Gol. ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sundari Rastafari
NIM : 193515516013
Perguruan Tinggi : Universitas Nasional
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

telah melaksanakan kegiatan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Manajemen Risiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Upaya Mewujudkan *Good Governance*" di Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tanggal 3 Juli s.d. 21 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Juli 2023

Sekretaris,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Jonny P. Simamora, S.I.P., M.Si.
NIP 197312251993031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan dokumen dapat dicek melalui tautan <https://sbrn.bsn.go.id/verifikasi>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sundari Rastafari
Npm : 193515516018
Tempat Tanggal Lahir : Depok, 19 September 2000
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jatijajar II . RT 001/008 . No. 47 . Kelurahan
Jatijajar, Tapos, Kota Depok
No. Telepon/HP : 0895365266085
Email : sundarirasta09@gmail.com

Pendidikan Formal

(2006-2012) SDN Sukamaju 03 Depok
(2012-2015) SMP Yapemri Depok
(2015-2018) SMK Yapemri Depok
(2019-2023) Universitas Nasional



cek Skripsi Sundari Rastafari_193515516018

ORIGINALITY REPORT

14%	14%	4%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	3%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
3	www.coursehero.com Internet Source	1%
4	ppsdmaparatur.esdm.go.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	www.balitbangham.go.id Internet Source	<1%
7	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1%
8	jurnal.polban.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%